

Determinan Aglomerasi Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat

Zulfa Emalia

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Lampung

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat, pengaruh tenaga kerja sektor industri, upah minimum kabupaten/kota, serta kondisi infrastruktur jalan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari badan pusat statistik Jawa Barat dengan jumlah cross-section sebanyak 26 kabupaten/kota selama periode 2008 – 2013 dan menggunakan alat analisis Indeks Hoover Balassa. Hasil estimasi menunjukkan aglomerasi secara signifikan dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja sektor industri dan infrastruktur jalan berpengaruh positif, sedangkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap aglomerasi di Provinsi Jawa Barat.

Key words: Aglomerasi, Fixed Effect Model, Indeks Hoover Balassa

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri manufaktur (*manufacturing industry*) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang (NSB), hal ini karena sektor industri manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin (*the leading sector*) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian (Arsyad, 1991). Berdasarkan kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara termasuk juga Indonesia.

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery (Kuncoro, 2002). bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala (*scale economies*) disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*). Pengertian ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Alfred Marshall yang menggunakan istilah *localized industri* sebagai pengganti dari istilah ekonomi aglomerasi.

Perkembangan industri manufaktur merupakan faktor dominan dalam memacu dan mengangkat pembangunan sektor lainnya. Peningkatan produktifitas industri manufaktur diharapkan dapat memacu produktifitas dari sektor sektor yang lain sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan data jumlah IBS dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Jumlah IBS dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kab/Kota 2008 – 2013 (Unit) dan persen (%)

No	Kabupaten / Kota	2008		2010		2013	
		IBS	Laju pertumbuhan (%)	IBS	Laju pertumbuhan (%)	IBS	Laju Pertumbuhan (%)
1	Bogor	664	5.58	648	5.09	697	6.04
2	Sukabumi	272	3.90	267	4.02	254	4.7
3	Cianjur	98	3.92	90	4.53	96	4.67
4	Bandung	889	4.04	862	5.88	1012	5.96
5	Garut	140	5.30	158	5.34	184	4.82
6	Tasikmalaya	30	5.31	33	4.27	53	4.46
7	Ciamis	109	4.69	94	5.07	84	5.09
8	Kuningan	41	4.02	35	4.99	36	4.84
9	Cirebon	490	4.95	447	4.96	321	4.83
10	Majalengka	459	4.28	433	4.59	413	4.87
11	Sumedang	84	4.91	75	4.22	77	4.6
12	Indramayu	112	4.57	80	4.03	81	3.33
13	Subang	27	4.57	26	4.34	27	3.1
14	Purwakarta	164	4.58	159	5.77	161	7.39
15	Karawang	287	4.55	325	11.87	529	7.92
16	Bekasi	698	1.66	802	6.18	1114	6.11
17	Bandung Barat	166	4.33	159	5.47	170	5.94
18	Kota Bogor	95	4.24	92	6.14	93	5.86
19	Kota Sukabumi	22	4.87	20	6.11	20	4.88
20	Kota Bandung	745	10.84	680	8.45	476	8.87
21	Kota Cirebon	54	11.10	48	3.81	48	4.79
22	Kota Bekasi	194	6.07	186	5.84	191	6.81
23	Kota Depok	99	6.42	89	6.36	95	6.92
24	Kota Cimahi	134	4.77	139	5.3	139	5.18
25	Kota Tasikmalaya	107	5.70	62	5.73	65	5.92
26	Kota Banjar	15	4.82	20	5.28	21	5.34
	Jumlah	6.195	133.99	6.029	143.64	6.457	143.24
	rata - rata	238,26	5,1	231,88	5,5	248,34	5,6

Sumber : BPS Jawa Barat, 2013

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan industri di Provinsi Jawa Barat dimulai pada tahun 2008 sebesar 6.195 unit, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 6.029 unit, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6.457 unit. Dampak dari terjadinya krisis global di tahun 2009 – 2010 mengakibatkan penurunan jumlah industri pada tahun 2010. Meningkat kembali di tahun 2013 disebabkan kestabilan ekonomi pada tahun tersebut. Hal itu mendorong meningkatnya kembali jumlah IBS di Provinsi Jawa Barat dan membuat perkembangan industri mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dari data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang semakin meningkat di setiap tahun dari tahun 2008 sebesar 5,1 %, tahun 2010 5,5 % dan tahun 2013 5,6 %.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aglomerasi yaitu adanya tenaga kerja sektor industri yang mendorong Struktur perekonomian suatu negara sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja pembangunan ekonominya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi penting dalam

struktur biaya usaha, karena perusahaan membayar upah sebagai balas jasa terhadap perusahaan. Teori perubahan struktural menyatakan bahwa mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa yang tangguh (Todaro dan Smith, 2006).

Selain tenaga kerja, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat yaitu upah yang merupakan biaya input yang harus dikeluarkan oleh perusahaan memiliki kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mendukung dan melindungi kedua belah pihak. Penetapan UMK yang terlalu tinggi di suatu daerah akan menyebabkan peningkatan biaya produksi yang.

Sehingg salah satu daya tarik keputusan berlokasi di suatu tempat adalah dengan tingkat upah yang rendah. Infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan kegiatan

ekonomi antar wilayah sehingga distribusi barang dan jasa dapat bergerak dengan lancar (Taryono dan Ekwarso, 2013). Pentingnya pembangunan jalan akan mempermudah akses kemajuan suatu daerah. Dengan jalan yang baik, proses distribusi barang dan jasa akan mudah dilakukan. Keberadaan jalan dengan sendirinya akan menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah. Sehingga pembangunan jalan yang baik akan membuka peluang bagi kemajuan dan tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi. Berikut merupakan data kondisi Infrastruktur jalan di Indonesia

Tahun	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km)
2008	742.573
2010	847.314
2013	496.607

Tabel 2 merupakan kondisi infrastruktur Indonesia periode Tahun 2008 – 2013 panjang jalan provinsi. Infrastruktur panjang jalan menurut tingkat kewenangan (negara, provinsi, dan kabupaten), selama kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan pada Tahun 2013 panjang jalan sebesar 496.607 Km. Panjang jalan beraspal yang kondisinya baik dan sedang, baik jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kabupaten/kota di masing masing kabupaten/kota. Kondisi jalan yang baik dan sedang diharapkan lebih menentukan kelancaran kegiatan ekonomi dibandingkan jalan yang rusak, sehingga panjang jalan yang digunakan dalam penelitian ini tidak memasukkan jalan yang rusak. sebagai pendorong peningkatan mobilitas dan aksesibilitas suatu industri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terjadi aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh tenaga kerja sektor industri, upah minimum kota/kabupaten dan infrastruktur jalan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.

METODOLOGI

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data time series dari tahun 2008-2013 serta data

1. Indeks Hoover Balassa, untuk menganalisis titik konsentrasi spasial industri manufaktur. Indeks Balassa digunakan untuk menghitung aglomerasi,

kekhususan indeks ini adalah dapat digunakan untuk membedakan faktor spesialisasi dimana disini diwakili oleh tenaga kerja.

$$\frac{\sum_{ij} \frac{\sum_j E_{ij}}{\sum_i E_{ij}}}{\sum_i \sum_j \frac{E_{ij}}{E_{ij}}}$$

Adapun rumus indeks Balassa sebagai berikut :

Indeks Balassa =

Dimana :

i = Sektor

E = Tenaga Kerja

j = Kabupaten

J = Provinsi

Pembilang dari indeks ini menyajikan bagian wilayah dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur, Semakin terpusat suatu industri, semakin besar indeks Balassanya, Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata – rata atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai satu berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi, (Sbergami, 2010).

2. Analisis Data Panel

Regresi data panel digunakan untuk menjawab tujuan kedua dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur di Jawa Barat. Data panel (*panel data*) merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu.

Adapun spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Ag = \beta_0 + \beta_1 \ln TKS_{it} + \beta_2 \ln UMK_{it} + \beta_3 \ln JLN_{it} + \varepsilon$$

Dimana :

Ag = Aglomerasi kabupaten/kota i

pada tahun t

β_0 = Koefisien intersep yang merupakan skala

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, = Koefisien slope atau kemiringan

$\ln\text{TKSI}$ = log natural Tenaga Kerja Sektor Industri kabupaten/kota i pada tahun t

$\ln\text{UMK}$ = log natural Upah Minimum Kabupaten/Kota i pada tahun t

$\ln\text{JLN}$ = ln Panjang Jalan Kabupaten/Kota i pada tahun t

ε_t = Error term

i = 1,2,...,n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross section*)

t = 1,2,...,t, menunjukkan dimensi runtun waktu (*time series*)

PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki industri manufaktur besar dan sedang paling tinggi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal itu didasari oleh perhitungan dengan menggunakan indeks ballasa untuk mengetahui terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan hasil dari perhitungan menggunakan Indeks Ballasa.

Tabel 4. Indeks Ballasa Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Barat (%) Tahun 2008 -2013

No	Kabupaten/kota	Tingkat Aglomerasi
1	Bogor	1.332.115
2	Sukabumi	1.227.287
3	Cianjur	0.169464
4	Bandung	1.710.624
5	Garut	0.220905
6	Tasikmalaya	0.054179
7	Ciamis	0.100259
8	Kuningan	0.07307
9	Cirebon	0.517545
10	Majalengka	0.579094
11	Sumedang	0.670178
12	Indramayu	0.112127
13	Subang	0.344919
14	Purwakarta	2.122.258
15	Karawang	2.032.311
16	Bekasi	2.925.633
17	Bandung Barat	0.788234
18	Kota Bogor	0.722455
19	Kota Sukabumi	0.385204
20	Kota Bandung	1.162.273
21	Kota Cirebon	0.514808
22	Kota Bekasi	0.742923
23	Kota Depok	0.577669
24	Kota Cimahi	4.670.107
25	Kota Tasikmalaya	0.332857
26	Kota Banjar	0.628213

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 4 menyatakan bahwa aglomerasi terjadi di Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan kriteria terjadi atau tidaknya

suatu aglomerasi:

- Indeks ballasa > 4 = aglomerasi dikatakan kuat
- Indeks ballasa 2- 4 = aglomerasi dikatakan sedang
- Indeks ballasa 1-2 = aglomerasi dikatakan lemah
- Indeks ballasa 0 = aglomerasi tidak terjadi

Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi syarat terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat dalam tingkatan > 4 adalah Kota Cimahi 4,67.

Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, proses selanjutnya adalah melakukan estimasi model panel data dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Sesuai dengan hasil uji spesifikasi Chow dan Hausman, dalam penelitian ini persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5. Hasil Estimasi Panel Data dengan Pendekatan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.559669	0.331927	1.686123	0.0942
LN_TKSI	0.135575	0.014267	9.502821	0.0000
LN_UMK	-0.083760	0.019619	-4.269344	0.0000
LN_JLN	0.029896	0.010855	2.753955	0.0068
R^2		0.967980		
F-statistics		136.0357		

Sumber: data diolah berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 8, maka dapat ditulis persamaan regresi:

$$\text{Ag}_{it} = 0.559669 + 0.135575 \ln\text{TKSI}_{it} - 0.083760 \ln\text{UMK}_{it} + 0.029896 \ln\text{JLN}_{it}$$

Nilai koefisien regresi tenaga kerja sektor industri adalah sebesar 0.135575 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap kenaikan penyerapan tenaga kerja sektor industri sebesar 1% maka akan meningkatkan Aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,13 % *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa tenaga kerja sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya aglomerasi di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Purnomo, 2014) yang menyatakan bahwa Pemusatan industri dapat terjadi di suatu lokasi karena terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Misalnya, bahan – bahan

mentah, tenaga kerja, energi, pasar, izin mendirikan usaha, pajak yang lebih murah, penanggulangan limbah industri. Sehingga hal ini juga sesuai pada teori lokasi

Nilai koefisien regresi upah minimum Kabupaten/kota adalah sebesar -0.083760 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap meningkatnya tingkat upah minimum Kabupaten/kota sebesar 1% maka akan berdampak pada menurunnya aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,083 % *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya aglomerasi di Jawa Barat. Bila dipandang melalui teori lokasi Weber yang menempatkan faktor biaya tenaga kerja sebagai faktor dominan dalam penentuan lokasi industri di samping biaya transportasi. Hasil yang diperoleh juga sesuai dengan teori lokasi, hipotesis teori lokasi menyatakan bahwa sebuah pabrik akan memilih berlokasi di daerah dengan tingkat upah yang rendah untuk meminimumkan biaya produksi (Purwaningsih, 2011).

Nilai koefisien regresi infrastruktur jalan adalah sebesar 0.029896 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap meningkatnya kondisi infrastruktur jalan sebesar 1% maka akan berdampak pada terjadinya aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,029% *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa infrastruktur jalan Kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aglomerasi di Jawa Barat. Panjang jalan mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian. Distribusi faktor produksi maupun barang dan jasa hasil produksi sangat tergantung dari keberadaan infrastruktur jalan. Secara spasial, mobilitas manusia dan hasil produksi ini menentukan kemajuan suatu wilayah karena interaksi dan keterbukaan dengan wilayah lain meningkatkan pangsa pasar baik faktor produksi maupun hasil produksi (Purwaningsih, 2011). Teori Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada biaya transportasi dalam hal ini kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap terjadinya aglomerasi industri.

Tabel 6. Nilai Koefisien *Fixed Effect* Pada Masing-Masing kabupaten/kota di Povinsi Jawa Barat

<i>Fixed Effect (Cross)</i>	Koefisien	<i>Individual Effect</i>
Bogor	0.083524	0.643193
Sukabumi	0.063078	0.622747

Cianjur	-0.692006	-6.132337
Bandung	0.482920	1,042,589
Garut	-0.72315	-0.163481
Tasikmalaya	-0.643794	-0.084125
Ciamis	-0.682523	-0.122854
Kuningan	-0.592154	-0.122854
Cirebon	-0.500816	0.058853
Majalengka	-0.40593	0.153739
Sumedang	-0.280482	0.279187
Indramayu	-0.66831	1,227,979
Subang	-0.590654	1.042589
Purwakarta	1.103180	1.662.849
Karawang	0.811784	1.371.453
Bekasi	1.661718	2.221.387
Bandung Barat	-0.184001	0.375668
Kota Bogor	-0.215705	0.343964
Kota Sukabumi	-0.283195	0.276474
Kota Bandung	0.009366	0.569035
Kota Cirebon	-0.229142	0.330527
Kota Bekasi	-0.301209	0,25846
Kota Depok	-0.378845	0,180824
Kota Cimahi	3.603649	4.163.318
Kota Tasikmalaya	-0.454148	0,105521
Kota Banjar	-0.060809	0.49886

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 5, terdapat nilai *individual effect* pada masing-masing kabupaten/kota di Povinsi Jawa Barat. Kota Cimahi merupakan kabupaten dengan *individual effect* terbesar dan Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten dengan *individual effect* terkecil. Berikut merupakan analisis intersep model regresi *fixed effect* :

1. Jika ada perubahan tenaga kerja sektor industri, umk, dan jalan baik antar daerah maupun antar waktu, maka Kota Cimahi akan mendapatkan pengaruh sebesar 4,1 % terhadap aglomerasi Provinsi Jawa Barat.
2. Jika ada perubahan tenaga kerja sektor industri, umk, dan jalan baik antar daerah maupun antar waktu, maka dengan *individual effect* yang paling rendah dan berarti tidak terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien intersep aglomerasi dari setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai berbeda. Adanya perbedaan nilai koefisien intersep tersebut dimungkinkan karena daerah yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nilai koefisien intersep ini menunjukkan perbedaan perilaku dari masing-masing daerah. Daerah yang memiliki koefisien intersep yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai aglomerasi lebih tinggi dibanding daerah lain. Sedangkan daerah yang memiliki koefisien intersep yang negatif memiliki aglomerasi yang lebih rendah dibanding daerah lain.

Faktor yang mempengaruhi bahwa relatif rendahnya aglomerasi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat adalah masih terbatasnya infrastruktur di masing-masing Kabupaten/kota, perbedaan biaya upah dan terbatasnya tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Indeks Ballasa tahun 2008 – 2013 menyatakan bahwa terjadi aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 1 Kota yang memenuhi kriteria perhitungan indeks ballasa yaitu Kota Cimahi.
2. Tenaga Kerja Sektor Industri dan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan hipotesis dan teori lokasi yaitu bahwa Pemusatan industri dapat terjadi di suatu lokasi karena terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, salah satunya tenaga kerja dan infrastruktur. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan hipotesis dan teori lokasi yang dikemukakan oleh Weber. Secara bersama-sama variabel Tenaga Kerja

Sektor Industri (TKSI), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Infrastruktur Jalan (JLN) berpengaruh terhadap terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.

Saran

Pentingnya bagi suatu daerah untuk dapat menjadi pusat aglomerasi karena selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya juga dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian diharapkan perekonomian daerah sekitarnya juga bisa ikut tumbuh dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap khususnya sektor industri. Dalam rangka pemerataan pembangunan maka perlu adanya pemerataan fasilitas infrastruktur dan pendirian industri industri baru di daerah-daerah yang memiliki potensi. Dalam jangka panjang interkoneksi berbagai infrastruktur tersebut secara meluas akan memberikan potensi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan jika terpusat.

DAFTAR PUSTKA

- Badan Pusat Statistika. 2008-2013. *Jawa Barat Dalam Angka 2013*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons LTD. London.
- Capello, R. 2007. *Regional Economics*. Routledge, New York.
- Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat 2013. *Upah minimum kabupaten/kota di . provinsi Jawa Barat*.
- Fujita dan J.F thisse, 1996 Fujita, M., dan J.F. Thisse, 1996. "The Economics of Agglomeration." *Journal of Japanese and International Economics*.
- Fujita, M. and T. Mori. 1996. The Role of Ports in Making of Major Cities: Self Agglomeration and Hub-Effect. *Journal of Development Economics*. Vol. 49 : 93-120
- Fujita, M., P. Krugman, dan A.J. Venables. 1999. *The Spasial Economics: Cities, Regional and International Trade*. The MIT Press, Cambridge and London.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometric*, John Wiley & Sons, Fourth Edition. New York.
- Hayter, 2000 Hayter, R. 2000. *The Dynamic of industrial Location: The Factory, the Firm and*

- The Production System*. Chichester : John Wiley & Sons
- Hilmiyah,Widyah.2013.*AnalisisKonsentrasi spasial & pengembangan kawasan industri di Kab. Gresik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Indikator Tenaga KerjaProvinsi Jawa Barat 2013*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Jabal,Gilang.2014. *Analisis Aglomerasi di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Jannifer,Shandy.2010. *Analisis pengaruh Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur terhadap Pertumbuhan dengan Ketimpangan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Krugman, P. 1998. Space: the Final Frontier. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 12(2): 161-174.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri*. UPPAMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro,Mudrajad.2002. *Analisis Spasial Dan Regional*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Martin dan octavianno 2001. *Dinamika Aglomerasi di Jawa*, Tahun 2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Matitaputty.2010. *Analisis Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Dengan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 1994-2007*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- McCann, P. 2006. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press. Oxford Inc. New York.
- Mudrajad,2002 Kuncoro, Mudrajat. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Nuryadin.2007. *Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi : Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Sakti.2007. *Analisis Aglomerasi dan Faktor yang Mempengaruhi Terkonsentrasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Pulau Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.22 No.1, Yogyakarta